

**KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN
STUNTING DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S1 Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**MUHAMMAD IKHSAN
TM/NIM: 2017/17042215**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting Di Kota Padang

Nama : Muhammad Ikhsan
NIM / TM : 17042215/2017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Februari 2023

Pembimbing,


Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309272005011004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat, tanggal ujian 18 November 2022 Pukul 10.00 WIB s/d 11.00




WIB

Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting Di Kota Padang

Nama : Muhammad Ikhsan
TM/NIM : 2017/17042215
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Februari 2023

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Rahmadani Yusran, S.sos.,M.Si	1. 
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP.,MA	2. 
Anggota	: Yulianti, SE.,ME	3. 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsan
NIM/BP : 17042215/2017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Komunikasi Kebijakan dalam pencegahan Stunting di Kota Padang”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 Februari 2023
Saya yang menyatakan,



Muhammad Ikhsan
17042215

ABSTRAK

Muhammad Ikhsan
17042215

Komunikasi Kebijakan dalam Pencegahan Stunting di Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting di Kota Padang dalam pencegahan stunting dan mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting. Pada tahun 2021 Kota Padang Sudah ditetapkan sebagai Lokus stunting oleh pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan Komunikasi Kebijakan harus di laksanakan seupaya mungkin oleh pemerintah pmerintah kota padang, dengan dilakukan Koordinasinasi dengan para OPD-OPD terkait, melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memanfaatkan media sebagai sarana Komunikasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif teknik pengambilan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas dan OPD-OPD terkait dan Untuk pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Di Kota Padang pelaksanaan Komunikasi pencegahan stunting belum diterapkan secara ideal. Karena belum samanya pola fikir para pemangku kepentingan dalam pencegahan stunting dan masih menganggap bahwa pelaksanaan pencegahan stunting hanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan saja Padahal berdasarkan Peraturan Presiden no 72 tahun 2021 menyebutkan bahwa seluruh Pemerintah baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota melaksanakan pencegahan Stunting pada masing – masing instansi, agar Komunikasi kebijakan dapat berjalan dengan sukses maka dilaksanakan Koordinasi yang optimal agar muncul kesepemahaman yang sama, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta pemanfaatan media dalam pencegahan stunting DI Kota Padang

Kata Kunci: Komunikasi, Kebijakan, Stunting, Kota Padang

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Komunikasi Kebijakan dala Pencegahan Stunting di Kota Padang**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Univeristas Negeri Padang.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, berkat bantuan dan bimbingan mereka sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terima kasi kepada :

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D Selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zikri Alhadi., S.IP., MA selaku Penguji Pertama yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
6. Yuliarti.,SE.,ME Selaku Dosen Penguji kedua yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

7. Bapak Drs. Karjuni Dt.Maani, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Dan Ibu Dosen Staff Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
9. Staff karyawan, karyawati keputakaan dan staff administratif Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
10. Bapak/ ibu lainnya yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua IPDA Masril chan dan Arnilen dalam doa, dukungan dan semangatnya dalam penulis mengerjakan skripsi ini.
12. Teman-teman dan sahabat terbaik saya Muhammad Furqan S,AP , Novia Putri S.AP, Aldo Fernando , Weno aulia tri putra , Erik Maulana Putra nide, Dan Sonia Junita S.AP, Refisca Hidayat, Devita sari yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Seluruh rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 17 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Termakasih atas kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang telah dibangun bersama.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca.

Padang, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	16
1. Konsep Kebijakan Publik	16
2. Konsep Implementasi Kebijakan	18
3. Konsep Komunikasi Kebijakan	27
4. Konsep Pencegahan stunting	32
B. Penelitian Yang Relevan	37
C. Kerangka Konseptual.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Informan Penelitian.....	45
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	47
G. Uji Keabsahan Data	48
H. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	51
1. Gambaran Umum Kota Padang	51
2. Deskripsi Dinas Kesehatan Kota Padang	52
3. Deskripsi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat	55
4. Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.....	57
5. Deskripsi BAPPEDA Kota Padang.....	58
6. Deskripsi Dinas Sosial Kota Padang.....	61
7. Deskripsi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	65
8. Deskripsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Kota Padang	71
B. Temuan Khusus	76
1. Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting di Kota Padang	76
a) Terlaksananya Koordinasi Antar Lintas Sektor	78
b) Komunikasi Kebijakan Melalui Sosialisasi yang Dilakukan Kepada Masyarakat	81
c) Memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi.	85
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting di Kota Padang	91
Faktor Pendukung Komunikasi Kebijakan dalam pencegahan <i>Stunting</i> di Kota Padang	92
a) Terlaksananya Koordinasi Antar OPD	92
b) Tersedianya komunikasi melalui media massa	93
c) Adanya Kader Pembangunan Manusia (KPM) Serta Dukungan Dari Masyarakat.....	95

Faktor Penghambat Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting di Kota Padang.....	97
a) Keterbatasan Ketersediaan Data <i>Stunting</i> Oleh OPD Lainnya.....	97
b) Kurangnya Ketersediaan Anggaran.....	98
c) Pola Fikir dan Perbedaan Pandangan Serta OPD Belum Menjadikan Stunting Sebagai Program Khusus.....	99
C. Pembahasan	102
1. Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan <i>Stunting</i> di Kota Padang	102
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting di Kota Padang	109
a) Faktor Pendukung Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting di Kota Padang	109
b) Hambatan Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting di Kota Padang	112
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	
LAMPIRAN DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	45
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data Kabupaten/ Kota Sumatera Barat Melaksanakan Surveilens Gizi 2020	11
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual Penelitian	41
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Padang.....	55
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat	58
Gambar 4. 3	Struktur Organisasi Bappeda Kota Padang	61
Gambar 4. 4	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang	64
Gambar 4. 5	Struktur organisasi Dinas perikanan dan pangan Kota Padang..	70
Gambar 4. 6	Struktur Organisasi D3AP2KB kota Padang.....	74
Gambar 4. 7	Rembuk Stunting/Koordinasi Antar Opd Kota Padang	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencegahan *Stunting* di Indonesia selama ini masih banyak menyisakan persoalan dilematik bagi pemerintah pusat dan daerah. Di satu sisi, pemerintah sudah mempertimbangkan bermacam-macam kebijakan perihal pencegahan *stunting*. Namun, pada sisi lain angka *stunting* masih tinggi jumlahnya di bermacam tempat. Hal ini, menandakan bahwa kebijakan pencegahan *stunting* di Indonesia belum sukses dijalankan. Contohnya, masih banyaknya masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang rendah perihal nutrisi, kurangnya pengetahuan ibu seputar pemanfaatan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, kerja sama lintas sektoral dalam pencegahan *stunting* belum maksimal, proses pengawasan dan pendataan program *stunting* masih amat terbatas, ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi keperluan nutrisi, dan masih banyak persoalan lainnya. Inilah permasalahan pemerintah dalam menjalankan pencegahan *stunting* di Indonesia.

Stunting merupakan keadaan gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) pengaruh kekurangan nutrisi kronis dan infeksi berulang khususnya dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), merupakan dari bayi dalam kandungan sampai anak berusia 23 bulan (TNP2K, 2017). *stunting* yaitu gangguan pertumbuhan pada anak yang tidak berimbang antara berat badan, tinggi badan, dan usia.

Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting cukup tinggi, yaitu 24,4 persen pada tahun 2021 dan masih di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20% .Hasil dari *South East Asian Nutrition Survey* (SEANUTS) pada tahun 2010- 2011 menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah anak balita pendek terbesar, jauh di atas Malaysia, Thailand serta Vietnam. Pada tahun 2010, gambaran tinggi standar anak usia 5 tahun adalah 110 centimeter, namun tinggi rata-rata anak Indonesia umur 5 tahun, kurang 6,7 centimeter untuk anak laki-laki dan kurang 7,3 centimeter untuk anak perempuan (Stunting.go.id)

Ketika memasuki usia 19 tahun, tinggi kurang 13,6 centimeter untuk anak laki-laki dan kurang 10,4 centimeter untuk anak perempuan dari semestinya (Erik, 2020). Kejadian gagal tumbuh yang terjadi pada usia balita akan berlanjut ke usia berikutnya. Besar kemungkinan ketika mereka menginjak usia 19 tahun, maka tinggi badan optimal tidak tercapai. Mereka akan menjadi manusia dewasa yang pendek dengan keterbatasan untuk berproduktivitas optimal (Stunting.go.id, 2021), Data menunjukkan masih tingginya persentase perempuan usia 15-19 tahun yang tidak lagi meneruskan sekolah dan masuk pada usia reproduksi yang selanjutnya melahirkan lagi anak-anak yang kurang gizi.

Permasalahan kesehatan yang di alami Indonesia yang menjadi sorotan publik ada 3 dan *stunting* menjadi salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia. pemerintah telah meluncurkan rencana aksi nasional penanganan *stunting* pada bulan Agustus 2017, yang menekankan pada kegiatan konvergensi di tingkat Nasional, daerah dan desa, untuk memprioritaskan kegiatan intervensi

Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif pada 1.000 hari pertama kehidupan hingga sampai dengan usia 6 tahun.

Penanganan pencegahan *stunting* dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada sasaran 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak sampai berusia 6 tahun. kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% Intervensi *stunting*. Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Angka *stunting* atau anak gagal tumbuh akibat kurang asupan gizi di Kota Padang berada pada level 11,5 persen. Angka tersebut cukup jauh dari yang ditetapkan WHO sebagai daerah rawan *stunting*, yakni 20 persen. Namun begitu, pemerintah pusat menetapkan Padang sebagai lokus *stunting* pada tahun 2021 ini karena diprediksi angka *stunting* tiap daerah akan meningkat di masa pandemi. (Harian Umum Kota Padang)

Suatu organisasi yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan yang sedikit berbeda dengan organisasi biasa. Organisasi pemerintah dituntut untuk sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Organisasi pemerintah dibuat berdasarkan situasional yang ada di kehidupan sosial dan memfokuskan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Salah satu organisasi yang dibuat oleh pemerintah adalah Komisi Pencegahan *stunting*.

Komunikasi diperlukan di dalam pencegahan *stunting* baik organisasi perangkat daerah kepada masyarakat atau antar organisasi perangkat daerah,

karena komunikasi merupakan upaya di dalam menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan secara bersama, diperlukan peran aktif oleh semua sektor agar masalah terutama pencegahan *stunting* dalam diselesaikan dengan baik. Karena komunikasi merupakan proses penyampaian yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan kesepahaman bersama, menciptakan pengaruh melalui pesan yang akan disampaikan, Para pemangku kepentingan memiliki peranan penting di dalam pencegahan *stunting* yang nantinya diharapkan dapat terciptanya perubahan perilaku di masyarakat dengan memastikan terselenggaranya penjangkauan yang sistematis terhadap para pengambil keputusan, permasalahan *stunting* tidak menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan atau Dinas kesehatan saja. Pemerintah provinsi sampai pemerintah desa sekalipun ikut ambil peran, termasuk lembaga-non pemerintah serta dinas-dinas dan organisasi perangkat daerah lainnya juga berperan dalam upaya pencegahan kasus *stunting* ini. Dinas-dinas dan organisasi perangkat daerah yang dimaksud oleh (TNP2K) seperti Bappeda, PU, Disdik, Dinas Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta untuk mendukung percepatan pencegahan *stunting* melalui penyediaan alat bantu, dan pengembangan kapasitas penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku.

Ada 4 langkah yang dilakukan dalam komunikasi di dalam menciptakan perubahan perilaku yaitu pertama menyampaikan atau mengedukasi masyarakat yang belum mengetahui bagaimana pencegahan *stunting*. Kedua negosiasi pernah mendengar dan mengetahui, ketiga mendorong untuk mencoba, mendukung agar terus melakukan di setiap kegiatan kehidupan. Namun demikian, komunikasi

kebijakan pencegahan *stunting* belum optimal dilakukan pemerintahan Kota Padang yang dapat dilihat dari beberapa permasalahan berikut:

Pertama, Komunikasi Kebijakan dalam pencegahan *stunting* belum terlaksana sebagai mestinya karena keterbatasan ketersediaan anggaran, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan menjelaskan karena bahwa terbatasnya ketersediaan anggaran karena 2 tahun pandemic covid 19 seluruh anggaran di alihkan kepada penanganan covid 19.

Kedua, masih adanya ego sektoral dan perfikiran yang selektif, berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan bahwa *stunting* hanya bagian dari tugas bidang kesehatan saja, OPD diluar bidang kesehatan hanya menjalankan menyesuaikan apa yang sudah dilakukan dan menganggap itu bagian dari pencegahan *stunting*

Ketiga, Keterbatasan ketersediaan data *stunting* oleh OPD lainnya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan Dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan dalam pencegahan *stunting* yang paling utama adalah data, apapun yang dilakukan berdasarkan dengan data dalam komunikasi kebijakan menjadi penentu langkah apa yang akan dilakukan, koordinasikan, dan akan terlaksananya komunikasi yang baik antar stakeholder, di dalam pencegahan *stunting* menghambat pelaksanaan komunikasi kebijakan yaitu data, OPD terkait tidak memiliki data, data itu yang pegang itu Dinas Kesehatan yang memiliki akses penuh, oleh karena itu pelaksanaan koordinasi terganggu, hal itu berdampak pada kurang efektif pelaksanaan pencegahan *stunting* Kerena tidak tersedianya data sebagai bahan rujukan bagi OPD terkait, dan pelaporan kepada Bappeda menjadi terhambat.

Keempat, komunikasi kebijakan Kota Padang belum tercapai karena kapasitas pengelola program memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang tidak efektif dan efisien. Hal ini juga tidak terlepas dari masalah komunikasi yang kurang dilaksanakan dengan baik karena ada komunikasi yang terputus antara Lembaga atas dengan Lembaga yang di bawahnya. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus agar pencegahan *stunting* di Kota Padang dapat terlaksana dengan baik sehingga kasus *stunting* dapat menurun. Pelatihan ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara baik dari institusi pemerintah maupun masyarakat madani, misalnya kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan perwakilan organisasi keagamaan untuk menerapkan strategi kampanye dan komunikasi perubahan perilaku dan mencapai hasil yang diharapkan

Kendala dalam pencegahan *stunting* adalah selama ini pemerintah belum maksimal melaksanakan kerja sama antar dinas-dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Padang. Hal ini, tidak sesuai dengan pedoman pencegahan *stunting*. Dimana, salah satu upaya percepatan pencegahan *stunting* adalah dilaksanakan secara bersama-sama menyoar kategori target. Karenanya dari itu, apabila dijalankan secara bersama-sama benar-benar memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.

Selanjutnya, instansi daerah masih belum mengerti apa peran peting instansi di luar bidang kesehatan melakukan pencegahan *stunting*, kebanyakan dari instansi daerah hanya menjalankan program sendiri dan tidak menganggap

hal tersebut bagian dari percepatan pencegahan *stunting*, untuk itu pentingnya sebuah komunikasi strategis dan intervensi program dari berbagai organisasi perangkat daerah terkait di dalam mengatasi masalah *stunting* penyebab terjadinya kendala di dalam proses komunikasi antar organisasi perangkat daerah yaitu koordinasi yang sulit, strategi yang tidak kiat, minat yang kurang dari organisasi perangkat daerah, jaringan antar organisasi perangkat daerah yang kuat, masih lemahnya kekuatan dalam merekat kebijakan, di dalam komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Hidayat, 2021). Permasalahan lainnya terlihat dari kebiasaan penduduk di Kota Padang, terutama dalam aktivitasnya di bidang pertanian atau perkebunan, sering kali mengharuskan orang tua meninggalkan anaknya di rumah. Meskipun anak mereka masih termasuk balita yang memerlukan pemberian ASI, namun tanggungan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan data angka *stunting* menurut Badan pusat statistik 29,9 Persen dengan masih di bawah rata-rata nasional, data dari Dinas kesehatan Sumbar ada 9 kabupaten/kota dengan angka *stunting* tertinggi di sumbar Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Sijunjung, 50 Kota, Padang Pariaman dan juga Kota Padang, Gubernur Sumbar mengatakan seluruh instansi pemerintahan yang ada di Sumbar memanfaatkan seluruh potensi yang ada di lingkungan masyarakat guna pencegahan *stunting*, Gubernur Sumbar meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah meminta program di dalam penanganan *stunting*.

Di Kota Padang menurut Kepala Dinas kesehatan kota padang Feri Mulyani mengatakan stunting di kota Padang sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat, Kemiskinan, Sanitasi. Ketersediaan Pangan dan yang paling utama dan penting adalah kemampuan calon ibu terhadap pemahaman tentang makanan yang sehat serta gerakan masyarakat sehat. Menurut Kepala Dinas kesehatan Kota Padang upaya lebih lanjutnya adalah mengarahkan program secara langsung kepada keluarga yang memiliki masalah stunting, seperti program bantuan seribu jamban dari dinas prasarana perumahan dan pemukiman, dan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang penanganan masalah stunting dapat terwujud jika semua OPD dan lintas sektor terkait terlibat dan berperan aktif dalam mengatasi stunting, penanganan stunting tidak lagi melalui intervensi spesifik saja, namun juga dibutuhkan intervensi sensitive melalui dinas dan OPD terkait, Pemerintah pusat pada tahun 2021 menyampaikan kota padang sebagai lokus utama di dalam pencegahan stunting karena angka kenaikan selama Pandemi covid 19. (Wahyudi, 2021)

Kepala Seksi kesehatan keluarga Dinas kesehatan Kota Padang Mengatakan dalam pencegahan stunting akan terus dilakukan upaya salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di mana para calon pengantin yang mendaftar ke KUA) di arahkan ke Puskesmas untuk bisa mendapatkan edukasi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.

Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 prevalensi kejadian stunting di Kota Padang yaitu 20,04%, dari 22 Puskesmas yang ada di Kota Padang ditemukan prevalensi tertinggi kejadian stunting di Puskesmas Air Dingin yaitu

57,14%. Wilayah kerja Puskesmas Air Dingin mencakup 3 kelurahan yaitu Kelurahan Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Gadang, Kelurahan Air Pacah. Berdasarkan data persentase penimbangan masal dengan TB/U ditemukan kasus stunting pada bayi usia 6-12 bulan di Kelurahan Lubuk Minturun 4 orang, Kelurahan Balai Gadang sebanyak 14 orang, dan Kelurahan Air Pacah 12 orang jadi jumlah bayi usia 6-12 bulan kasus stunting sebanyak 30 bayi di wilayah kerja puskesmas air dingin. Berdasarkan survei data awal yang dilakukan terhadap 10 ibu balita yang memiliki balita di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin Kota Padang diperoleh hasil bahwa mengalami stunting sebanyak 60%, mengalami berat badan lahir rendah 20% yaitu balita yang memiliki berat dan lahir kurang dari 2500 gram, pola asuh pada balita sebanyak 20%. (Huvaidd, Maywita, & Kurnia, 2021).

Data dari puskesmas rawang Pada tahun 2022 kecamatan padang selatan mencatat dalam melakukan verifikasi data dan hasilnya terungkap sebanyak 260 orang anak yang di duga mengalami stunting, dan ditindak lanjui akan dilakukan pemeriksaan olah dokter agar masalah stunting dan tidak mengalami lebih parah dan menjadi gizi buruk. (MC Kota Padang, 2022), Jika dibandingkan dengan jumlah kematian bayi dan anak balita di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menjadi penyumbang terbanyak kematian bayi dan anak balita. Pada tahun 2018 jumlah kematian bayi Provinsi Sumatera Barat sebanyak 547 orang dan jumlah kematian anak balita sebanyak 117 orang, sedangkan pada tahun 2019 jumlah kematian bayi Provinsi Sumatera Barat sebanyak 788 orang dan jumlah kematian anak balita sebanyak 111 orang.

Kepala Dinas DP3AP2KB mengatakan dalam Media Indonesia (2022) Pada awal tahun 2022 untuk provinsi Sumatera Barat berada pada angka 23% sementara itu Kota Padang kasus angka stunting berada pada 18,9% Pemerintah Kota Padang menargetkan bahwa pada tahun 2024 berada dibawah 14%.

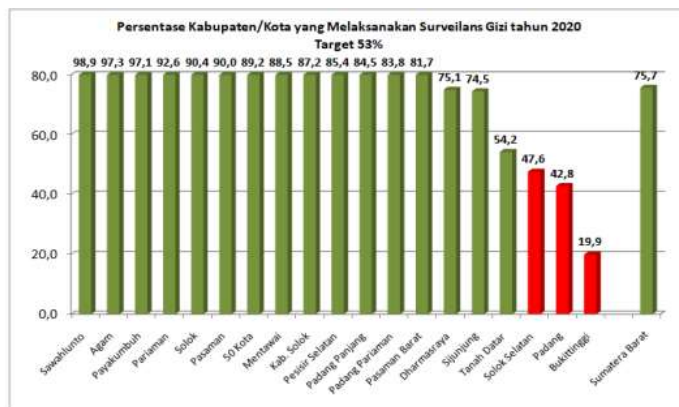
Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja angka kematian bayi adalah karena adanya kinerja yang baik dari semua pihak mulai dari Puskesmas, klinik, bidan praktek mandiri, rumah sakit dan lintas sektor terkait; Sistem pelayanan yang terpadu di Puskesmas dengan sistem e-Puskesmas, dimana semua pelayanan terpantau dan saling terintegrasi serta Dinas Kesehatan yang dapat memantau langsung pelayanan di Puskesmas; Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Padang, sehingga pelayanan sudah dilakukan dan diupayakan sesuai standard sesuai dengan SOP masing – masing layanan yang diberikan. Disamping itu Puskesmas juga telah melakukan yang meningkatkan pelayanan kesehatan secara umum dan pelayanan kesehatan pada bayi khususnya, seperti kelas IMUD (kelas ibu muda) dari Puskesmas Padang Pasir yang masuk TOP 45 pelayanan publik Kemenpan RB pada tahun 2018, AYO CETING (ayo cegah stunting) dari Puskesmas Andalas yang masuk TOP 99 pelayanan publik tahun 2019 serta penghargaan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2019 yang diraih oleh Puskesmas Padang Pasir dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga pada tahun 2019. Tidak tercapainya target indikator kinerja angka kematian anak balita pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh pandemik Covid 19 karena kegiatan posyandu yang merupakan kegiatan utama dalam pelayanan kesehatan

anak balita tidak aktif dan kunjungan rumah juga tidak bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu ketakutan orang tua terhadap penularan Covid 19 juga berpengaruh dalam penurunan kunjungan pelayanan kesehatan anak balita ke Puskesmas dan jejaringnya. (Dinas Kesehatan Kota Padang , 2020)

Data kematian bayi berusia dibawah lima tahun (balita) secara nasional dikutip dari databoks (katadata.co.id) mencapai pada angka 28.178 jiwa pada tahun 2020, 19.13 persen terjadi kematian dalam jangka usia 29 sampai 11 bulan, mayoritas angka kematian karena disebabkan berat badan lahir rendah dengan penyebab mengalami asfiksia 27,4 persen, kelainan kongnital 11,4 persen, infeksi 3,4 persen serta lainnya 22,7 persen. (kusnandar, 21)

sesuai data yang dari lakip satuan kerja Dinas Kesehatan provinsi sumatera barat bahwa berdasarkan kabupaten/ kota seluruh sumbar hanya bukitinggi dan kota padang yang belum mencapai target dengan kota padang yang berada pada angka 42,8% masih kurang dari target yang ditetapkan nasional yaitu 75,7%.

Gambar 1.1 Data Kabupaten/ Kota Sumatera Barat Melaksanakan Surveilens Gizi 2020



Sumber : Lakip Dinkes Sumbar 2020

Secara makro, dibutuhkan ketegasan kebijakan, strategi, regulasi, dan koordinasi lintas sektor dari pemerintahan dan semua *stakeholder* untuk menjamin terlaksana poin-poin penting seperti pemberdayaan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan yang secara tidak langsung akan mengubah budaya buruk dan paradigma di dataran bawah dalam hal perawatan gizi terhadap keluarga. Pemerintah terus mengintensitaskan program dan kegiatan tersebut untuk mengantisipasi kasus itu agar tidak melebar ke balita lain di daerah ini. (Dinas Kesehatan Kota Padang , 2020)

Dalam konteks implementasi kebijakan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu lembaga yang diberikan tanggung jawab terkait program keluarga berencana (KB) untuk pencegahan *stunting* salah satunya di Kota Padang dituntut tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan yang standar namun pelayanan kesehatan yang prima dengan mengedepankan kualitas dibutuhkan untuk memberikan hasil yang lebih baik yaitu penurunan angka persentase *stunting* di Kota Padang.

Hal tersebut tentunya sangat membutuhkan komunikasi kebijakan, dimana komunikasi kebijakan menjadi penentu berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Penyebaran pesan atau informasi sangat diperlukan bagi informasi, karena suatu program tidak akan berjalan tanpa adanya suatu strategi komunikasi. Suatu strategi komunikasi merupakan hal terpenting yang harus dilakukan guna menyampaikan pesan atau informasi kepada publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam maka peneliti memberi judul penelitian ini yaitu komunikasi kebijakan dalam pencegahan *stunting* di Kota Padang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang dijelaskan pada latar belakang dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Komunikasi Kebijakan dalam pencegahan *stunting* belum terlaksana sebagai mestinya karena keterbatasan ketersediaan anggaran
2. Masih adanya ego sektoral dan perfikiran yang selektif
3. Pola pikir di kalangan para pejabat yang belum menempatkan komunikasi sebagai bagian penting dalam proses implementasi kebijakan`
4. Keterbatasan ketersediaan data *stunting* oleh OPD lainnya.
5. Komunikasi kebijakan kota padang belum tercapai karena kapasitas pengelola program memberikan pengetahuan dan pelatih bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang tidak efektif dan efesien.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis akan membataasi masalah yang akan penulis teliti, yaitu: perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang belum konsisten dan berkelanjutan karena komunikasi antar pribadi belum sesuai dengan konteks sasaran, komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan kurang optimal serta belum terlaksana dengan baik

advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan. komunikasi kebijakan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintahan Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang sebelumnya, maka permasalahan pokok yang ingin di teliti sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi komunikasi kebijakan di dalam pencegahan *stunting* di Kota Padang. ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan *stunting* di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui faktor pendukung dan penghambatan komunikasi kebijakan dalam pencegahan *stunting* di Kota Padang.
2. Menganalisis komunikasi kebijakan di dalam pencegahan *stunting* di Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengembangan manfaat teoritis, dan manfaat praktis yaitu membantu di dalam mengatasi masalah yang ada pada objek yang akan diteliti.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan rujukan dan menambah ilmu pengetahuan di dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan studi tentang komunikasi dan advokasi.

2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah kebijakan terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan penurunan *stunting* di Kota Padang.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan rujukan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.